

PERAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DALAM PEMBEBASAN SANDERA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) OLEH KELOMPOK TERORIS ABU SAYYAF PADA TAHUN 2016

Tholhah¹, Anggun Dwi Panorama², Winda Nurjanah³

¹²³Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Jenderal Achmad Yani

¹tholhah@lecture.unjani.ac.id

Abstract

In 2016, kidnappings at sea globally experienced an increase in cases compared to the previous 10 years. One of them occurred in the Sulu Sea which is between eastern Malaysia and the Philippines. A series of kidnappings for ransom have been reported since March 2016. As of 2016, there have been 17 kidnapping cases at sea and 6 failed abduction attempts at sea, of which some of the victims came from Indonesia. The kidnappings are related to attacks carried out by a terrorist group operating in the Southern Philippines, namely the Abu Sayyaf terrorist group. This study aims to analyze the role of the Indonesian Red Cross (PMI) as a non-state actor in negotiating with the Abu Sayyaf group to free 10 Indonesian citizens (WNI) who were taken as hostages on March 26, 2016. The author uses a sociological liberalism theory approach, the concept of track two diplomacy and negotiation according to Guy Olivier Faure which consists of three stages of negotiation, namely (1) the pre-negotiation stage, (2) the formula formation stage, and (3) the adjustment stage to analyze PMI's role. The results of this study indicate that PMI's role in the effort to free the 10 Indonesian citizens highlighted its role as a non-state actor who prioritized humanitarian assistance through the negotiation process so as to facilitate the release of the hostages which in the end the 10 Indonesian citizens were released on May 1, 2016.

Kata Kunci: *Indonesian Red Cross, Hostage Release, Abu Sayyaf Group*

PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh ICC *International Maritime Bureau's* (IMB) *annual piracy report*, bahwa pada tahun 2016 aksi penculikan di laut mengalami kenaikan kasus dibandingkan 10 tahun sebelumnya, meskipun aksi perompakan secara global menurun. Aksi penculikan di laut yang menjadi perhatian khusus terjadi di Laut Sulu yang berada di antara timur Malaysia dan Filipina (International Chamber of Commerce (ICC), 2017). Serangkaian aksi penculikan untuk tebusan telah dilaporkan sejak Maret 2016 (Koh Collin, 2017). Terhitung pada tahun 2016, telah terjadi 17 kasus penculikan di laut dan gagalnya upaya penculikan di laut sebanyak 6

kasus (Jasmine, 2017). Aksi penculikan tersebut berkaitan dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris yang beroperasi di Filipina Selatan, yakni kelompok teroris Abu Sayyaf (Koh Collin, 2017). Dari peristiwa penculikan di laut tersebut membuat negara yang warga negaranya menjadi korban menaruh perhatian khusus untuk upaya pembebasan warga negaranya yang disandera oleh kelompok teroris Abu Sayyaf.

Berkaitan dengan aksi penculikan di laut yang dilakukan kelompok teroris Abu Sayyaf di sepanjang tahun 2016 ini, beberapa korban didominasi oleh ABK asal Indonesia. Salah satunya adalah kasus penyanderaan yang terjadi pada 26 Maret 2016 terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12. Dimana kelompok teroris Abu Sayyaf menculik 10 Anak Buah Kapal (ABK) kapal tersebut yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Kapal yang mengangkut sebanyak 7.000 ton batu bara tersebut sedang berlayar dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina (BBC Indonesia, 2016). Dalam aksinya tersebut kelompok teroris Abu Sayyaf menuntut uang tebusan sebesar 50 juta peso dengan batas waktu hingga 8 April 2016 (Wijaya 2016). Ini membuat Indonesia dalam upaya pembebasan sandera harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar dapat menghindari langkah pembayaran penebusan kepada kelompok teroris tersebut serta memperhatikan keselamatan sandera.

Selang beberapa hari setelah kabar penyanderaan terhadap 10 ABK asal Indonesia oleh kelompok teroris Abu Sayyaf, Menlu RI, Retno Marsudi, pada 1 April 2016 mengunjungi Filipina untuk menyelamatkan WNI tersebut. Kunjungan diagendakan untuk langsung berkoordinasi dengan Menlu Filipina saat itu, Jose Rene Almendras. Meski dalam pertemuan tersebut Jubir Menlu enggan mengungkap hasil pertemuan, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan ke-10 ABK tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa keselamatan dari ABK itu sendiri menjadi prioritas dalam upaya pembebasan tersebut (Wijaya 2016). Hal tersebut dilakukan sebagai langkah awal yang dilakukan negara sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya di luar negeri.

Selain itu, dalam upaya pembebasan ke-10 ABK tersebut, TNI juga melakukan kerja sama intelijen antara Indonesia dan Filipina di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri. Aktivitas intelijen tersebut dipimpin oleh pensiunan Mayor Jenderal Kivlan Zen. Dalam aksinya, Kivlan telah memulai negosiasi sehari setelah peristiwa penyanderaan terjadi sebagai pihak yang mewakili PT. Patria Maritime Lines (Hidayat, 2016) selaku perusahaan dimana 10 ABK tersebut bekerja (Tuwo, 2016). Pengaruh Kivlan dalam pembebasan adalah adanya hubungan baik dengan sejumlah tokoh Moro setelah pernah menjadi anggota pasukan penjaga perdamaian dalam konflik Filipina-MNLF pada tahun 1995-1996. Sehingga dengan dimanfaatkannya pengaruh Kivlan tersebut dapat berelaborasi dengan upaya yang juga dilakukan Pemerintah Indonesia yang terus berkomunikasi dengan Pemerintah Filipina.

Kesiagaan TNI terhadap kasus penyanderaan ke-10 ABK tersebut menunjukkan kesiapannya dalam upaya pembebasan. Ini terlihat dari siapnya Pasukan TNI dari berbagai kesatuan yang disiagakan di perbatasan Tarakan, Kalimantan Utara dan menunggu perintah untuk melakukan pasukan militer. Hal itu berdasar dari pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menegaskan bahwa pasukan TNI telah siap apabila Filipina meminta bantuan Indonesia untuk menangani kelompok teroris Abu Sayyaf yang menyandera WNI tersebut. Sayangnya, pasukan TNI tidak diperbolehkan otoritas Filipina untuk membantu pembebasan secara langsung, karena Filipina tidak mengizinkan bantuan kekuatan militer (negara lain). Meski begitu, Pemerintah Filipina berkomitmen untuk menyelesaikan pembebasan serta terus berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia (Andwika, 2016). Ini merupakan sikap Indonesia dalam menghormati konstitusi Filipina mengenai pelarangan penggunaan kekuatan militer Indonesia di Filipina.

Oleh karena itu, Menlu RI, Retno Marsudi, menggunakan jalur diplomasi total dalam upaya pembebasan ke-10 ABK tersebut (Soepardi, 2016). Diplomasi total (*track two diplomacy*) merupakan diplomasi yang dilakukan atas penggabungan bentuk diplomasi jalur satu dan diplomasi

jalur dua yang saling berkoordinasi. Dalam diplomasi jalur satu, aktor negara yang terlibat dalam strategi diplomasi ini antara lain Kemenlu, TNI dan Polri. Sedangkan dalam diplomasi jalur dua, aktor non-negara yang terlibat adalah (1) para profesional, (2) perwakilan dari Yayasan Sukma bentukan Surya Paloh seperti pensiunan jenderal besar Supriadin, Ahmad Baedowi, Samsu Rizal Panggabean, dan jurnalis Metro TV, Desi Fitriani, (3) melibatkan dua NGO yakni pemberdayaan masyarakat dan anti kekerasan di Mindanao, Filipina Selatan, serta (4) tim bentukan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menugaskan Hamid Awaludin, selaku Ketua Divisi Hubungan Internasional Palang Merah Indonesia (PMI) (Kumala Dewi, 2019). Hal tersebut menekankan koordinasi yang melibatkan sektor formal dan informal dalam upaya pembebasan ke-10 ABK menggunakan *soft power*, setelah potensi penggunaan *hard power* (kekuatan militer) tidak bisa diterapkan.

Salah satu aktor non-negara yang terlibat dalam pembebasan tersebut, yakni tim bentukan Jusuf Kalla memanfaatkan koneksi yang dimilikinya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Hal tersebut dilakukan Jusuf Kalla melalui penugasan terhadap Hamid Awaludin dalam mengurus pembebasan sandera. Hamid Awaludin sendiri merupakan Ketua Divisi Hubungan Luar Negeri Palang Merah Indonesia Pusat yang juga mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam aksinya, Hamid menggunakan jaringan Palang Merah Internasional serta Palang Merah Filipina. Dalam tim tersebut lebih menaruh perhatian untuk memantau pergerakan atau posisi para sandera hingga memastikan kondisi kesehatan para sandera selama masih berada di tangan para penyandera (Tempo, 2016). Hal tersebut sejalan dengan apa yang diharapkan Pemerintah Indonesia dalam menaruh perhatian kepada keselamatan para sandera.

Kelompok Abu Sayyaf sendiri merupakan kelompok teroris yang berkembang di Filipina Selatan dan berbasis di Mindanao Barat, Filipina. Kelompok ini juga dikenal sebagai Al Harakat Al Islamiyya yang terbentuk di tahun 1991 sebagai respon terhadap *Moro National Liberation Front* (MNLF) yang mampu bernegosiasi dengan otoritas Filipina atas perjuangan Bangsamoro merdeka (Permono, 2019). Namun kelompok ini memiliki

kecenderungan yang radikal dan bersikap di luar nilai-nilai keislaman. Hal tersebut disebabkan oleh tindakan yang mengarah pada ekstrimisme. Untuk markas persembunyian, kelompok teroris ini bermarkas di hutan untuk melatih para anggotanya. Meskipun kelompok teroris Abu Sayyaf merupakan kelompok teroris terkecil di Filipina (Ghofur 2016), namun kemampuan serta ancaman dari kelompok tersebut penting untuk menjadi perhatian Indonesia, terutama dalam aksi penculikan di laut dengan tujuan uang tebusan di perbatasan perairan Indonesia-Filipina.

Dominasi anggota dan pengikut kelompok teroris Abu Sayyaf merupakan keluarga Muslim yang memiliki tradisi pelayaran yang kuat selama berabad-abad. Hal tersebut mempengaruhi pengetahuan mereka secara mendalam mengenai ranah maritim. Sehingga mampu mendukung kemampuan yang cukup untuk melakukan kejahatan maritim. Disisi lain, kelompok Abu Sayyaf juga memiliki peralatan yang dapat digunakan untuk melancarkan operasinya, salah satunya adalah penggunaan perahu berkecepatan tinggi (Rommel C. Banlaoi, 2005). Hal tersebut membuat kelompok Abu Sayyaf dapat melancarkan aksi kriminal di laut dengan modus penculikan atau penyanderaan untuk tujuan uang tebusan, walau tak mengesampingkan posisinya sebagai kelompok teroris dengan kehendak separatistis (Permono, 2019). Aksi yang dilakukan di perairan perbatasan, menjadikannya sebagai kelompok teroris yang telah mengembangkan kemampuan untuk melancarkan terorisme maritim di Asia Tenggara.

Sebelum terjadi banyaknya aksi penculikan di laut oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di sepanjang tahun 2016 terhadap WNI, telah terjadi pula peristiwa serupa di masa lalu. Pada tahun 2002, kelompok Abu Sayyaf melancarkan aksi penculikan terhadap WNI dengan meminta tebusan. Penculikan tersebut dilakukan ketika kapal berbendera Indonesia dengan 4 Anak Buah Kapal (ABK), *Lebroy 179* dibajak (Sekarwangi, 2019). Lalu pada 5 Oktober 2003, penculikan terjadi pada 3 ABK yang diculik di Borneo Paradise Eco Resort Farm (Tim Antara, 2019). Tahun berikutnya, terjadi kembali dua kasus penyanderaan. Pertama terjadi penyanderaan terhadap kapal *tugboat East Ocean* (Walter Sampel) pada 11 April 2004 dan menculik satu ABK asal

Indonesia (Dhono, 2019). Lalu, penyanderaan terhadap 9 ABK asal Indonesia dari kapal tunda Christian terjadi pada penghujung tahun 2004. Selanjutnya, pada 30 Maret 2005 terjadi kembali penyanderaan terhadap 3 ABK dari kapal berbendera Malaysia (Kompas, 2016). Kasus yang terjadi pada tahun 2005 itulah terjadi jeda selama 11 tahun lamanya hingga pada 26 Maret 2016 aksi penyanderaan di laut oleh kelompok teroris Abu Sayyaf terjadi kembali menimpa WNI.

PEMBAHASAN

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi yang berada dibawah cakupan gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional ini mencakup tiga komponen utama, yakni (1) International Committee of the Red Cross (ICRC), (2) International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), dan (3) lebih dari 190 Perhimpunan-perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Meski berada dalam cakupan gerakan yang sama, ketiga organisasi tersebut masing-masing berdiri sendiri yang memiliki statusnya sendiri serta tak ada wewenang atas yang lainnya (Oktaviani, Sari, & Akbar, 2019). Secara Internasional pada 15 Juni 1950, keberadaan PMI diakui oleh Komite Internasional Palang Merah (International Committee of the Red Cross) atau disingkat ICRC. Setelah itu, PMI diterima sebagai menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah pada 16 Oktober 1950 (Munandar, 2008). Selain itu, kesemua organisasi dalam Gerakan Palang Merdan Bulan Sabit termasuk kedalam *International Non-Governmental Organization* (INGO) (Klabbers, 2017). Sebagai salah satu aktor non-negara, PMI pernah terlibat dalam pembebasan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf pada 26 Maret 2016, melalui tim bentukan Jusuf Kalla ini memanfaatkan koneksi yang dimilikinya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Untuk menganalisis peran PMI tersebut, penulis selanjutnya akan menggunakan tiga tahapan proses negosiasi yang mencakup (1) tahapan pra-negosiasi, (2) tahapan pembentukan formula, dan (3) tahapan penyesuaian, dimana

ketiganya akan menjadi instrumen dalam melakukan analisis pada Pembahasan ini.

Tahapan Pra-Negosiasi

Tahapan pra-negosiasi secara umum memerlukan pendekatan diplomatis sebab pada jam-jam pertama penyanderaan kemungkinan pembunuhan bisa saja terjadi. Keadaan ketidakpastian dari aksi penyanderaan membuat situasi tersebut mesti distabilkan dengan membangun saluran komunikasi, membentuk kelompok manajemen krisis, hingga memilih tim negosiasi. Selanjutnya, kondisi para sandera harus otoritas hukum pastikan bahwa mereka benar-benar hidup. Selagi secara aktif berkomunikasi pada tahapan ini, intelijen pun akan dikumpulkan dengan tujuan untuk mempersiapkan negosiasi yang selanjutnya akan dilakukan (Faure, 2011). Dalam kata lain pada tahapan pra-negosiasi ini diskusi apa pun mengenai substansi dari negosiasi tidak diperlukan namun hanya mengupayakan penetapan kondisi pelaksanaan negosiasi itu sendiri.

Seperti informasi yang tertuang sebelumnya, ketika informasi penyanderaan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 serta penculikan terhadap 10 Anak Buah Kapal (ABK) tersebut yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) pada 26 Maret 2016 oleh kelompok teroris Abu Sayyaf diwartakan, pemerintah Indonesia sudah mengambil tindakan melalui diplomasi yang melibatkan Kemenlu, TNI, serta Polri. Oleh karena dilarangnya penggunaan kekuatan militer dari luar oleh pemerintah Filipina dalam penyelesaian pembebasan para sandera WNI, maka Menlu RI, Retno Marsudi menyampaikan penggunaan jalur diplomasi total atau *track two diplomacy* yang melibatkan aktor non-negara, salah satunya yakni tim bentukan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu yang menugaskan Hamid Awaludin, selaku Ketua Divisi Hubungan Internasional Palang Merah Indonesia (PMI). Peran yang dijalankan PMI dalam melaksanakan diplomasi tersebut yakni melalui proses negosiasi dengan kelompok teroris Abu Sayyaf. Negosiasi yang dilakukan PMI juga termasuk kedalam tiga jalur negosiasi yang melibatkan dua tim negosiasi lainnya yang masing-masing tim tersebut mempunyai jaringan berbeda untuk sampai ke

kelompok teroris Abu Sayyaf (Tempo, 2016). Pada halaman berikutnya terlampir ilustrasi tiga jalur negosiasi yang dilaksanakan tiga tim tersebut yang penulis dapatkan dari majalah Tempo: Berebut Panggung Pembebasan Sandera dengan judul berita “Mahar Paman Selepas Sandera”.

Dalam tahapan pra-negosiasi ini, Jusuf Kalla memanfaatkan koneksi yang dimilikinya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia dalam membentuk tim yang disebut sebagai tim Jusuf Kalla. Pembentukan tim oleh Jusuf Kalla ini dilakukan melalui penugasan terhadap Hamid Awaludin dalam mengurus pembebasan sandera. Hamid Awaludin sendiri merupakan Ketua Divisi Hubungan Luar Negeri Palang Merah Indonesia Pusat yang juga mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saat itu. Penetapan kondisi pelaksanaan negosiasi dari tim Jusuf Kalla ini, Hamid menggunakan jaringan Palang Merah Internasional serta Palang Merah Filipina. Selanjutnya tim tersebut akan menaruh perhatian untuk memantau pergerakan atau posisi para sandera hingga memastikan kondisi kesehatan para sandera selama masih berada di tangan para penyandera. Keterlibatan tim bentukan Jusuf Kalla yang dipimpin Hamid Awaludin ini merupakan representatif atas peran Palang Merah Indonesia (PMI) dalam pembebasan WNI tersebut yang dikoordinasi oleh Lalu Muhammad Iqbal selaku Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Tempo, 2016).

Proses negosiasi yang dilakukan tim Jusuf Kalla ini selaras dengan visi PMI yang berbunyi “*Palang Merah Indonesia (PMI) mampu dan siap menyediakan dan memberikan pelayanan kepalangmerahan dengan cepat dan tepat dengan berpegang teguh pada Prinsip-prinsip Dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*”. Sedangkan misi PMI berisi empat poin misi, yaitu (1) Menyebarluaskan dan mendorong aplikasi secara konsisten Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, (2) Melaksanakan kesiapsiagaan dalam menangani bencana dan konflik yang berbasis pada masyarakat, (3) Memberikan bantuan dalam bidang kesehatan yang berbasis masyarakat, (4) Mengelola transfusi darah secara profesional, serta (5) Berperan aktif dalam menangani bahaya HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA. Sebelumnya, ICRC pernah berkoordinasi dengan

PMI berkenaan dengan bantuan kemanusiaan pada operasi pembebasan sandera di Aceh dalam konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (RAFIKA 2006), yang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Sehingga pada proses pra-negosiasi yang dilakukan tim Jusuf Kalla akan berperan sebagai tim yang memfokuskan terlebih dahulu terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan para korban sandera.

Tahapan Pembentukan Formula

Pada tahapan kedua atau pembentukan formula ini mencakup disepakatinya permasalahan-permasalahan apa saja yang bisa dilakukan untuk negosiasi. Seringkali tahapan ini cukup berlarut sebab beberapa tuntutan dari kelompok teroris tidak semuanya bisa pemerintah penuhi, seperti halnya menyediakan senjata ataupun pembuatan permintaan maaf kepada publik. Peranan penting terhadap penggunaan waktu yang digunakan dengan baik bisa membantu menekan opini publik maupun tekanan dari keluarga para sandera, sebab kedua hal tersebut bisa mempengaruhi tujuan awal untuk melawan teroris menjadi memenuhi keinginan mereka. Tidak jarang teroris meningkatkan tuntutan yang merumitkan interaksi negosiasi dengan kelompok tersebut sebab mereka berpikiran bahwa pemerintah akan membebaskan warga negaranya dengan menebus sejumlah uang (Faure, 2011). Maka dari itu, penting untuk dibutuhkan kreativitas, kredibilitas, hingga komitmen dalam melaksanakan tahapan ini.

Terdapat tuntutan yang diajukan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf terkait penyanderaan ini yakni dipenuhinya uang tebusan sebesar 50 juta peso dengan batas waktu hingga 8 April 2016 (Wijaya, 2016). Tuntutan tersebut menjadi satu permasalahan yang disepakati untuk dilakukan negosiasi oleh ketiga tim negosiasi, termasuk tim Jusuf Kalla. Disepakatinya negosiasi tersebut, selain menggunakan jaringan Palang Merah secara formal, tim Jusuf Kalla juga secara informal menunjuk seseorang yang memiliki jaringan dengan kelompok Moro. Selain itu, tim Jusuf Kalla akan menempuh negosiasi melalui bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada

keluarga kelompok teroris Abu Sayyaf (Tempo, 2016) tersebut serta negosiasi agar dapat memastikan kondisi kesehatan para korban sandera baik-baik saja. Melalui negosiasi menggunakan *soft power* dari tim Jusuf Kalla saat itu diharapkan bisa memberi pengaruh terhadap keputusan kelompok Abu Sayyaf terhadap pembebasan para sandera serta terhindarnya dari ditebusnya uang tebusan yang mereka tuntut. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang diharapkan Pemerintah Indonesia dalam menaruh perhatian kepada keselamatan para sandera dan terlaksananya pembebasan secara aman tanpa adanya kekerasan.

Tahapan Penyesuaian

Tahapan terakhir atau tahapan penyesuaian ini terkait penyesuaian terhadap tiap-tiap masalah yang diterima kedua belah pihak. *Zero-sum game* umumnya digunakan pada tahapan ini dengan segala cara dapat digunakan kedua belah pihak seperti menipu satu sama lain, pengurangan uang tebusan, hingga risiko penangkapan. Salah satu contoh yang dilakukan pihak aparat misalnya dengan membayar uang tebusan menggunakan uang palsu, sedangkan pihak penculik melakukan pembunuhan terhadap sandera untuk menghindari ditemukannya persembunyian kelompok teroris tersebut karena sandera yang terbebas. Kejadian tak terduga pada tahapan ini bisa menjadi sebuah rangkaian "*fait accompli*" daripada negosiasi (Faure, 2011). Maka keterampilan negosiasi pada tahapan ini diperlukan agar rangkaian "*fait accompli*" tersebut tidak terjadi dan tujuan negosiasi tercapai.

Penyesuaian tiap-tiap masalah yang diterima kedua belah pihak didapati bahwa pihak tim negosiasi, salah satu nya tim Jusuf Kalla menerima negosiasi perihal tuntutan uang tebusan untuk membebaskan 10 sandera WNI, sedangkan pihak kelompok Abu Sayyaf menerima negosiasi pembebasan 10 sandera WNI demi tercapainya tuntutan uang tebusan. Untuk menjalankan negosiasi tersebut, secara informal, tim Jusuf Kalla melalui Hamid Awaludin pada 6 April 2016 menunjuk seseorang yang memiliki jaringan dengan kelompok Moro untuk membantu proses negosiasi pembebasan sandera tersebut. Meski tidak secara gamblang disebutkan oleh Hamid, seorang yang ditunjuk tersebut merupakan mantan narapidana

terorisme di Filipina, Agus Dwikarna. Agus pernah mendekam di penjara selama 11 tahun lamanya atas kasus terorisme, hingga akhirnya pada awal Januari 2014 ia bebas (Tempo, 2016). Melalui penunjukkan Agus tersebut membantu menambah jaringan tim Jusuf Kalla agar bisa sampai ke kelompok Abu Sayyaf.

Selain itu, tim Jusuf Kalla melakukan pemberian bantuan sosial kepada keluarga kelompok Abu Sayyaf yang dilakukan atas dasar kemanusiaan. Bantuan sosial tersebut berupa penyediaan makanan dan pakaian ini disokong oleh Jusuf Kalla selaku Ketua Umum PMI Pusat. Dikiriminya uang dari Jakarta (Jusuf Kalla) melalui penghubung ke kelompok sempolan Abu Sayyaf, Al-Habsyi Misaya, ini bertujuan untuk kebutuhan kedua sandera yang sakit. Namun uang tersebut ditegaskan bukan sebagai uang tebusan, melainkan hanya untuk sekedar membeli obat untuk menjamin keselamatan sandera (Tempo, 2016).

Di sisi lain tim bentukan Jusuf Kalla memberi bantuan sosial kepada keluarga kelompok Abu Sayyaf untuk membantu pula melancarkan proses negosiasi bersama tim negosiasi lainnya untuk membebaskan para sandera. Posisi dan kekuasaan yang dimiliki Jusuf Kalla yang saat itu merupakan Wakil Presiden serta Ketua Umum Palang Merah Indonesia, telah menyokong tim bentukannya dalam proses upaya pembebasan ke-10 sandera WNI ini. Namun, bantuan sosial tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan perwakilan politik Indonesia. Ini dikarenakan bantuan sosial tersebut murni atas dasar kemanusiaan. Melalui bantuan sosial ini, mereka berupa menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan serta pakaian yang disalurkan kepada keluarga kelompok Abu Sayyaf (Utomo, Basith Dir, & Purnama, 2020). Dari proses negosiasi tim Jusuf Kalla bersama tim negosiasi lainnya tersebut menumbuhkan kepercayaan kelompok Abu Sayyaf untuk membebaskan para sandera WNI.

Negosiasi yang dilakukan melalui tiga jalur negosiasi dari tiga tim negosiasi tersebut pun pada akhirnya mencapai keberhasilan yang juga menjadi kabar gembira terkait pembebasan para korban sandera asal WNI ini. Keberhasilan negosiasi tersebut pada akhirnya pemerintah Indonesia

harus membayar 5 juta peso kepada kelompok Abu Sayyaf dari tuntutan uang tebusan sebesar 50 juta peso (Joshua & Sidik, 2021). Meski begitu, negosiasi tetap berhasil karena kedua belah pihak mendapatkan hasil yang masing-masing pihak harapkan. Disisi lain, pembebasan yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2016 juga melibatkan pasukan tentara Indonesia dan Filipina untuk mengawal keselamatan evakuasi korban sandera. Sehingga 10 WNI korban sandera kelompok Abu Sayyaf secara resmi dibebaskan di daerah Sulu. Pada hari terbebasnya para korban sandera tersebut, 10 WNI dilepaskan di depan rumah Gubernur Sulu, Abdusakur Toto Tan II dan dijamu oleh Gubernur tersebut (Bata, 2016). Setelah proses pembebasan di Filipina usai, pada akhirnya 10 WNI tersebut bisa dipulangkan ke Indonesia untuk kembali kepada keluarga mereka masing-masing.

KESIMPULAN

Peran PMI dalam pembebasan ke-10 WNI yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf pada tahun 2016 didasarkan pada proses negosiasi yang dilakukan. Proses negosiasi tersebut mencakup tiga tahapan proses negosiasi. Tahapan pertama yakni tahapan pra-negosiasi yang dilakukan untuk mengupayakan penetapan kondisi pelaksanaan negosiasi dimana PMI melalui Jusuf Kalla memanfaatkan koneksinya sebagai Ketua Umum PMI membentuk tim Jusuf Kalla yang menugaskan Hamid Awaludin untuk menaruh perhatian dan memantau pergerakan atau posisi para sandera hingga memastikan kondisi kesehatan para sandera selama masih berada di tangan para penyandera.

Pada tahapan kedua yakni pembentukan formula, tuntutan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf terkait uang tebusan sebesar 50 juta peso menjadi satu permasalahan yang disepakati untuk dilakukan negosiasi. Pada tahapan ketiga yakni penyesuaian, dimana negosiasi tim Jusuf Kalla dengan Abu Sayyaf tersebut terdiri dari ditunjuknya seseorang yang memiliki jaringan dengan kelompok Moro untuk bisa sampai ke kelompok Abu Sayyaf, memberi bantuan sosial kepada keluarga kelompok Abu Sayyaf, serta pemberian uang untuk biaya obat sandera yang sakit. Hingga pada akhirnya negosiasi pembebasan tersebut membuahkan hasil, dimana ke-10 WNI

korban sandera Abu Sayyaf telah dibebaskan pada 1 Mei 2016, dengan membayar 5 juta peso kepada kelompok Abu Sayyaf dari tuntutan uang tebusan sebesar 50 juta peso.

DAFTAR PUSTAKA

- Andwika, Rizky. (2016). "Ini Sebab TNI Tak Bisa Masuk Filipina Bebaskan WNI Dari Abu Sayyaf | Merdeka.Com." *merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-sebab-tni-tak-bisa-masuk-filipina-bebaskan-wni-dari-abu-sayyaf.html> (April 30, 2023).
- Bata, Anselmus. (2016). "Sebelum Dipulangkan, 10 Sandera Dijamu Gubernur Sulu." *Berita Satu*. <https://www.beritasatu.com/dunia/362858/sebelum-dipulangkan-10-sandera-dijamu-gubernur-sulu> (April 30, 2023).
- BBC Indonesia. (2016). "Dua Kapal Indonesia Dibajak Di Filipina, 10 WNI Disandera." *BBC Indonesia*. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160329_indonesi_a_kapal_dibajak_filipina (April 30, 2023).
- Dhono, Yudho. (2019). "Sejak 2003, 37 WNI Berhasil Dibebaskan Dari Abu Sayyaf." *Berita Satu*. <https://www.beritasatu.com/dunia/592496/sejak-2003-37-wni-berhasil-dibebaskan-dari-abu-sayyaf> (April 30, 2023).
- Faure, Guy Olivier. (2011). *Negotiating with Political, Ideological, and Criminal Terrorists*.
- Ghofur, Abd. (2016). "Dinamika Muslim Moro Di Filipina Selatan Dan Gerakan Sparatis Abu Sayyaf." *Sosial Budaya* 13(2): 175–88.
- Hidayat, Faiq. (2016). "Kivlan Zein Tegaskan 10 WNI Dibebaskan Abu Sayyaf Tanpa Uang Tebusan | Merdeka.Com." *merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kivlan-zein-tegaskan-10-wni-dibebaskan-abu-sayyaf-tanpa-uang-tebusan.html> (April 30, 2023).
- International Chamber of Commerce (ICC). (2017). "IMB Report: Sea Kidnappings Rise in 2016 despite Plummeting Global Piracy." *International Chamber of Commerce (ICC)*: 1. <https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/imb-report-sea-kidnappings-rise-2016-despite-plummeting-global-piracy/> (April 30, 2023).
- Jasmine, Rossiana. (2017). "Analisis Peningkatan Frekuensi Penculikan Di Laut Oleh Abu Sayyaf Group (Asg) Pada Tahun 2016." *Journal of International Relations* 3(4): 214–21. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>.
- Joshua, Joshua & Hasan Sidik. (2021). "Diplomasi Yayasan Sukma Dalam Proses Negosiasi Pembebasan Sandera Warga Negara Indonesia Di Filipina Selatan." *Padjadjaran Journal of International Relations* 3(1): 1.

- Klabbers, Jan. (2017). *International Organizations International Organizations*. 3rd ed. New York: Routledge.
- Koh Collin, Lean Swee. (2017). "Is This the Most Dangerous Backwater in the World? - BBC News." *BBC*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-39252503> (April 30, 2023).
- Kompas.com. (2016). "Sejarah Sandera WNI Di Filipina Selatan." *Nasional.Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/04/05200061/Sejarah.Sandera.WNI.di.Filipina.Selatan?page=all> (April 30, 2023).
- Kumala Dewi, Putu Ratih. (2019). "The Use of Multitrack Diplomacy in The Liberation Of 10 Indonesian Ship Crew From The Abu Sayyaf Group 2016." *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 8(2): 188.
- Ma'ruf, T. (2020). STRATEGI POLITIK IKHWANUL MUSLIMIN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MESIR PASCA DIGULINGKANNYA MURSI. *Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(02), 219-237. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v5i02.239>
- Munandar, H. (2008). *Mengenal PMI Dan BaSARnas, Dua Garda Terdepan Menghadapi Bencana: Misi, Peranan, Serta Arti Penting PMI Dan BaSARnas Bagi Masyarakat Luas*. Jakarta: Airlangga. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=581zCQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kelompok+perang+checnya+di+rusia&ots=3cTD4LmjUo&sig=t41Xw3IPNf2f112-Vq7gINWYA80>.
- Oktaviani, Jusmalia, Suwarti Sari, & Taufan Herdansyah Akbar. (2019). "Mekanisme Penanggulangan Bencana Alam Oleh Palang Merah Indonesia (Pmi) Kabupaten Bandung." *Jurnal Academia Praja* 2(02).
- Permono, Prakoso. (2019). "Abu Sayyaf Group Di Filipina Selatan Setelah Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao." *Jurnal Global & Strategis* 13(2): 109.
- RAFIKA, HANY. (2006). "Peran International Committee of the Red Cross (Icrc) Dalam Mengatasi Masalah Kemanusiaan Di Aceh Tahun 2004-200." *Jurusan Ilmu Hubungan Internasional ± Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 2(2): 1-7.
- Rommel C. Banlaoi. (2005). "Maritime Terrorism in Southeast Asia-- The Abu Sayyaf Threat." *Maritime Terrorism in Southeast Asia* 58(4): 63-82.
- Sekarwangi, Hach Dhini. (2019). "Perlindungan Negara Atas Pelaut Di Luar Negeri (Studi Kasus Pelaut Indonesia Yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf)." *Jurist-Diction* 2(5): 1723.
- Soepardi, Hanni. (2016). "Retno Marsudi Nyatakan Pembebasan WNI Disandera Sukses Berkat Diplomasi Total - ANTARA News." *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/558339/retno-marsudi-nyatakan-pembebasan-wni-disandera-sukses-berkat-diplomasi-total> (April 30, 2023).

- Tempo, Tim. (2016). *Mahar Paman Selepas Sandera,* Tempo: Berebut Panggung Pembebasan Sandera.
- Tim Antara. (2019). "Daftar WNI Korban Penculikan Abu Sayyaf Di Sabah - Infografik ANTARA News." Antara. <https://www.antarane.ws.com/infografik/1225888/daftar-wni-korban-penculikan-abu-sayyaf-di-sabah> (April 30, 2023).
- Tuwo, Andeas Garry. (2016). "Patria Maritime Line: Kami Dikontak Abu Sayyaf Setiap Hari - News Liputan6.Com." *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/news/read/2498143/patria-maritime-line-kami-dikontak-abu-sayyaf-setiap-hari> (April 30, 2023).
- Utomo, Tri, Andi Basith Dir, & Indhi Purnama. (2020). "The Role of Government of Indonesia in Providing Aid and Protection to Indonesian Citizens Living Overseas." In *ICIPSE*,.
- Wijaya, Pandasurya. (2016). "Empat Strategi Pemerintah Selamatkan WNI Disandera Abu Sayyaf | Merdeka.Com." *merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/dunia/empat-strategi-pemerintah-selamatkan-wni-disandera-abu-sayyaf.html> (April 30, 2023).